

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020

Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5

Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3222837 Fax. (0536) 3231746

e-mail : pta_palangkaraya@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5
Telp. (0536) 3222837 Fax. (0536) 3231746
Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112
e-mail : pta_palangkaraya@yahoo.co.id / ptapraya@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, 6 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



MUKTI ALI, S.Ag., MH.

NIP. 197303071997031004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar	40
C.2. Aset Tetap	41
C.3. Aset Lainnya	46
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	46
C.6. Ekuitas	47

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	48
D.2.	Beban Pegawai.....	48
D.3.	Beban Persediaan	49
D.4.	Beban Barang dan Jasa	50
D.5.	Beban Pemeliharaan	50
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	51
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	52
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	52
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	54
D.11.	Beban Lain-lain.....	54
D.12.	Kegiatan Non Operasional	55
D.13.	Pos Luar Biasa	55
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	56
E.1.	Ekuitas Awal	56
E.2.	Surplus (defisit) LO	56
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset	56
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan.....	56
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	57
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	57
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	57
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	57
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	58
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	58
E.3.	Ekuitas Akhir.....	59
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	59
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	59
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	59

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3222837 Fax. (0536) 3231746 e-mail : pta_palangkaraya@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 6 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



MUKTI ALI, S.Ag., MH.

NIP. 197303071997031004

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya semester I Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.612.662.

Realisasi Belanja Negara pada semester I TA 2020 adalah sebesar Rp. 5.010.202.062 atau mencapai 43,51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 11.514.805.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 36.057.010.634, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 109.965.292; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 35.947.045.342; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 90.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 90.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 35.967.010.634.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.612.662, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.190.579.849, sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.188.967.187). Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional sebesar Rp. (230.659), sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar Rp. (5.189.197.846).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 36.147.619.080, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (5.189.197.846), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 5.008.589.400, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp. 35.967.010.634.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	1.612.662	34,96	2.792.892
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	1.612.662	34,96	2.792.892
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	8.000.932.000	3.137.245.279	39,21	3.895.796.468
2.	Belanja Barang	B.2.2.	3.341.073.000	1.700.196.783	50,89	837.896.121
3.	Belanja Modal	B.2.3.	172.800.000	172.760.000	99,98	0
	Jumlah Belanja Negara		11.514.805.000	5.010.202.062	45,51	4.733.692.589

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
NERACA
PER 30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	90.000.000	0
Persediaan	C.1. 2.	19.965.292	14.107.355
Jumlah Aset Lancar		109.965.292	14.107.355
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	23.523.189.000	23.523.189.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4.046.674.454	3.873.914.454
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	13.294.129.000	13.294.129.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	351.819.256	351.819.256
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	16.521.256	16.521.256
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(5.268.766.368)	(4.908.397.185)
Jumlah Aset Tetap		35.947.045.342	36.134.654.525
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		36.057.010.634	36.148.761.880
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada pihak ketiga	C.5. 1.	0	1.142.800

Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	90.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		90.000.000	1.142.800
Jumlah Kewajiban		90.000.000	1.142.800
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		35.967.010.634	36.147.619.080
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		36.057.010.634	36.148.761.880

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.612.662	2.792.892
Jumlah Pendapatan		1.612.662	2.792.892
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.137.245.279	3.895.796.468
Beban Persediaan	D. 3	25.159.012	22.881.007
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.282.609.944	414.647.161
Beban Pemeliharaan	D. 5	345.265.594	283.051.984
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	39.930.837	117.122.300
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	360.369.183	362.929.929
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		5.190.579.849	5.096.428.849
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.188.967.187)	(5.093.635.957)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(230.659)	52.156

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(5.189.197.846)	(5.093.583.801)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Ekuitas Awal	E. 1	36.147.619.080	39.495.387.642
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(5.189.197.846)	(5.093.583.801)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	5.008.589.400	3.034.200.322
Ekuitas Akhir		35.967.010.634	37.436.004.163

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagian

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya

Visi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah

- 1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama;
- 2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang modern;
- 3. Meningkatkan kualitas system pemberkasan perkara kasasi;

Meningkatkan kajian Syari’ah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- ✓ Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta keadilan masyarakat;

- ✓ Mewujudkan Peradilan yang mandiri dari campur tangan pihak lain;
- ✓ Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan;
- ✓ Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;
- ✓ Meningkatkan peranan Hakim pengawas bidang dalam melaksanakan tugas;
- ✓ Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan melekat kepada seluruh karyawan (i) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
- ✓ Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan institusi lain;
- ✓ Meningkatkan penindakan tegas terhadap pengaduan masyarakat;
- ✓ Melakukan secara optimal sistem teknologi informasi (TI).

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
1.612.662*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.612.622 atau mencapai 34,95 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4.613.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.613.000	1.612.662	34,95
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
4.	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang	0	0	0,00
Total Pendapatan		4.613.000	1.612.662	34,95

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. (1.180.230) atau (42,25) persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	0,00	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.612.662	2.792.892	(1.180.230)	(42,25)
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu	0	0	0,00	0,00
Total Pendapatan		1.612.662	2.792.892	(1.180.230)	(42,25)

B.2. Belanja

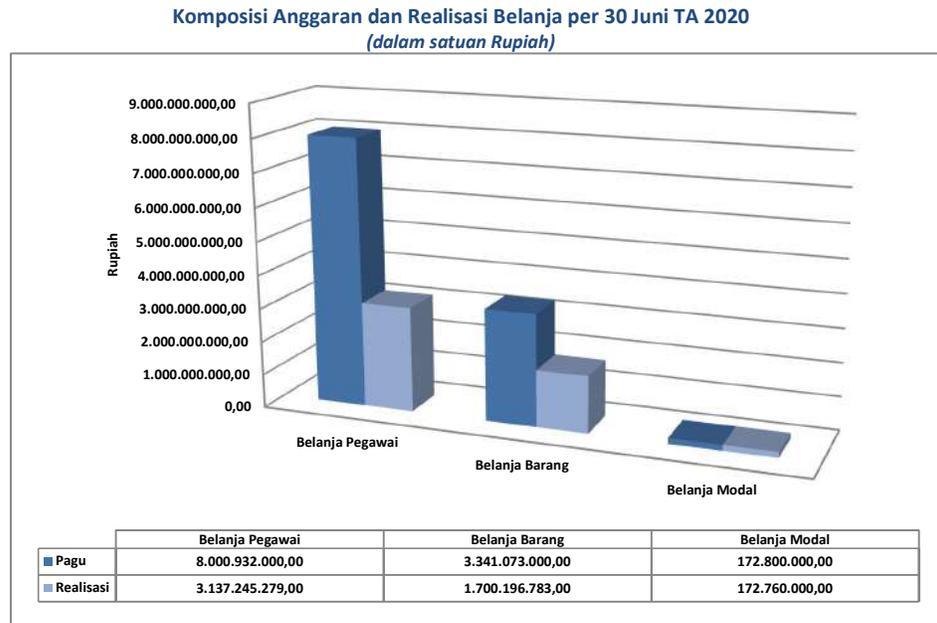
Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
5.010.202.06
2

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 5.010.202.062 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 43,51% dari anggaran senilai Rp. 11.514.805.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.000.932.000	3.137.245.279	39,21
Belanja Barang	3.341.073.000	1.700.196.783	50,89
Belanja Modal	172.800.000	172.760.000	99,98
Total Belanja Bruto	11.514.805.000	5.010.202.062	43,51
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	11.514.805.000	5.010.202.062	43,51

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2020

Terjadi kenaikan serapan anggaran dari tahun 2019, hal tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada TA. 2020 serta maksimalnya serapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.137.245.279	3.895.796.468	(758.551.189)	(19,47)
Belanja Barang	1.700.196.783	837.896.121	862.300.662	102,91
Belanja Modal	172.760.000	0	172.760.000	0,00
Total Belanja	5.010.202.062	4.733.692.589	276.509.473	5,84

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
3.137.245.279*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 3.137.245.279 dan Rp. 3.895.796.468.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar 19,47 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi hakim dan pegawai, sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	858.838.940	967.985.580	(109.146.640)	(11,27)
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.972	13.646	(3.674)	(26,92)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	62.211.566	72.998.518	(10.786.952)	(14,77)
Beban Tunj. Anak PNS	17.607.910	18.796.984	(1.189.074)	(6,32)
Beban Tunj. Struktural PNS	64.410.000	69.685.000	(5.275.000)	(7,56)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.611.600.000	2.105.255.000	(493.655.000)	(23,44)
Beban Tunj. PPh PNS	302.404.331	430.850.970	(128.446.639)	(29,81)
Beban Tunj. Beras PNS	37.368.720	39.758.580	(2.389.860)	(6,01)
Beban Uang Makan PNS	110.349.000	109.399.000	950.000	0,86
Beban Tunjangan Umum PNS	8.995.000	9.725.000	(730.000)	(7,50)
Beban Tunjangan Kemahalan	63.450.000	71.550.000	(8.100.000)	(11,32)
Hakim				
Total Belanja Brutto	3.137.245.439	3.896.018.278	(325.519.582)	(19,47)
Pengembalian Belanja	(160)	(221.810)	(222.595)	28,15
Total Belanja Netto	3.137.245.279	3.895.796.468	(325.740.607)	(19,47)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
1.700.196.78
3

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.700.196.783 dan Rp. 837.896.121.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 102,91 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	1.672.880.946	804.344.621	144.680.428	16,43
Belanja Barang Non Operasional	27.315.837	33.551.500	(37.934.582)	(1,88)
Total Belanja Brutto	1.700.196.783	837.896.121	862.300.662	102,91
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.700.196.783	837.896.121	862.300.662	102,91

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal :Rp
172.760.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 172.760.000 dan Rp. 0.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini dikarenakan penyerapan anggaran belanja modal pada semester I TA 2019 masih belum dilaksanakan.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	172.760.000	0	(52.000.000)	0,00
Total Belanja Brutto	172.760.000	0	(52.000.000)	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	172.760.000	0	(52.000.000)	0,00

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
109.965.292

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 109.965.292 dan Rp. 14.107.355.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	90.000.000	0
Persediaan	19.965.292	14.107.355
Total Aset Lancar	109.965.292	14.107.355

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 90.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 90.000.000 dan Rp. 0.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	31 Desember TA 2019
1.	Kas di Bank	70.050.033	0
2.	Tunai di Bendahara Pengeluaran	19.949.667	
	Jumlah	90.000.000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 19.965.292*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.965.292 dan Rp. 14.107.355. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	15.584.132	12.733.632
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	4.381.160	1.373.723
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		19.965.292	14.107.355

Saldo persediaan per 30 Juni 2020 telah melalui opname fisik persediaan sesuai dengan berita acara opname fisik nomor: **W16-A/1000/PL.02/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019**, dan kondisi persediaan dalam keadaan baik.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
35.947.045.342*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji sebesar Rp. 35.947.045.342 dan Rp. 36.134.654.525. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	23.523.189.000	23.523.189.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.046.674.454	3.733.358.854	(172.760.000)
3	Gedung dan Bangunan	13.294.129.000	14.521.322.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	335.298.000	274.566.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	16.521.256	16.521.256	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	41.215.811.710	41.043.051.710	172.760.000
	Akumulasi Penyusutan	(5.268.766.368)	(4.908.397.185)	(360.369.183)
	Nilai Buku Aset Tetap	35.947.045.342	36.134.654.525	(187.609.183)

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
23.523.189.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 23.523.189.000 dan Rp. 23.523.189.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.04.001.1	7.949 m ²	15.01.03.01.4.0 0420	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	PTA Palangka Raya	23.523.189.000
	Jumlah					23.523.189.000

Tidak ada mutasi selama tahun 2020.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
4.046.674.454*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.046.674.454 dan Rp. 3.873.914.454.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2020	3.873.914.454
Mutasi Tambah	172.760.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	4.046.674.454
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	(3.607.319.290)
Nilai Buku 30 Juni 2020	439.355.164

Mutasi tersebut adalah berupa belanja modal semester I TA. 2020.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
13.294.129.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 13.294.129.000 dan Rp. 13.294.129.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2020	13.294.129.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	13.294.129.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	1.507.923.847
Nilai Buku 30 Juni 2020	11.786.205.153

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
335.298.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 335.298.000 dan Rp. 335.298.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2020	335.298.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	335.298.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	146.523.231
Nilai Buku 30 Juni 2020	188.774.769

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
16.521.256*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 16.521.256 dan Rp. 16.521.256.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2020	16.521.256
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	16.521.256
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	(16.521.256)
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(5.268.766.368)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp. (5.268.766.368) dan Rp. (4.908.397.185).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	23.523.189.000	0	23.523.189.000
2	Peralatan dan Mesin	4.046.674.454	(3.607.319.290)	439.355.164
3	Gedung dan Bangunan	13.294.129.000	(1.507.923.847)	11.786.205.153
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	335.298.000	(146.523.231)	188.774.769
5	Aset Tetap Lainnya	16.521.256	(7.000.000)	9.521.256
	Jumlah	41.215.811.710	(5.268.766.368)	35.947.045.342

Aset Lainnya:
Rp 16.521.256

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 16.521.256 dan Rp. 16.521.256. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019
1	Monografi	3.863.900	3.863.900
2	Buku Lainnya	5.657.356	5.657.356
3	Alat Musik Modern/Band	7.000.000	7.000.000
	Nilai perolehan Aset Lainnya	16.521.256	16.521.256
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.000.000)	(7.000.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	9.521.256	9.521.256

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp 90.000.000

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 90.000.000 dan Rp. 1.142.800. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 30 Juni TA 2020 tercatat sebesar Rp. 90.000.000.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
1. Utang kepada pihak ketiga	0	1.142.800
2. Uang Muka dari KPPN	90.000.000	0
Jumlah	90.000.000	1.142.800

C.5.1. Utang kepada pihak ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga:
Rp 0 Utang kepada pihak ketiga per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 1.142.800.

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN:
Rp 90.000.000 Uang muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 90.000.000 dan Rp. 0.

C.6. Ekuitas

Cadangan Piutang:
Rp 35.967.010.634 Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.967.010.634 dan Rp. 36.147.619.080. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2020 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. (180.608.446) / (0,49 %) dari nilai per 31 Desember 2019. Jumlah nilai Kewajiban dan Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 36.057.010.634, sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 36.148.761.880.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP : Rp 1.612.662 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 1.612.662 dan Rp 2.792.892. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1.612.662	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
4.	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	1.612.662	0,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 3.137.245.279 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 3.137.245.279 dan Rp 3.895.796.468. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	858.838.940	967.985.580	(109.146.640)	(11,27)
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.812	11.836	(2.024)	(17,10)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	62.211.566	72.998.518	(10.786.952)	(14,77)
Beban Tunj. Anak PNS	17.607.910	18.796.984	(1.189.074)	(6,32)
Beban Tunj. Struktural PNS	64.410.000	69.685.000	(5.275.000)	(7,56)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.611.600.000	2.105.255.000	(493.620.000)	(23,44)
Beban Tunj. PPh PNS	302.404.331	430.850.970	(128.446.639)	(29,81)
Beban Tunj. Beras PNS	37.368.720	39.758.580	(2.389.860)	(6,01)
Beban Uang Makan PNS	110.349.000	109.399.000	950.000	0,86
Beban Tunjangan Umum PNS	8.995.000	9.540.000	(545.000)	(5,71)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	63.450.000	71.550.000	(8.100.000)	(11,32)
Total Beban Pegawai	3.137.245.279	3.895.796.468	(758.551.189)	(19,47)

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan : Rp
25.159.012

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 25.159.012 dan Rp. 22.881.007. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	25.159.012	22.881.007	2.278.005	9,95
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	25.159.012	22.881.007	2.278.005	9,95

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
1.282.609.944*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.282.609.944 dan Rp. 414.647.161. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	276.461.800	252.688.900	23.772.900	9,40
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.192.000	6.872.000	(2.680.000)	(38,99)
Beban Honor Operasional Satuan kerja	27.350.000	35.100.000	(7.750.000)	(22,07)
Beban Barang Operasional lainnya	32.746.950	46.822.845	(14.075.895)	(30,06)
Beban Bahan	3.109.000	0	3.109.000	0,00
Beban Langganan Listrik	70.942.731	67.270.690	3.672.041	5,45
Beban Langganan Telepon	1.068.063	1.258.926	(190.863)	(15,16)
Beban Langganan Air	4.659.400	4.633.800	25.600	0,55
Beban Sewa	862.080.000	0	862.080.000	0,00
Total Beban Jasa	1.282.609.944	414.647.161	867.962.783	209,33

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp 345.265.594*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 345.265.594 dan Rp. 283.051.984. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	192.876.917	162.711.865	30.165.052	18,53
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	46.564.470	2.535.000	44.029.470	1.736,86
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.582.250	110.695.475	(15.113.225)	(13,65)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	10.241.957	7.109.644	3.132.313	44,05
Total Beban Pemeliharaan	345.265.594	283.051.984	62.213.610	21,98

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
39.930.837*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 39.930.837 dan Rp. 117.122.300. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	39.930.837	114.582.300	(74.651.463)	(65,15)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	2.540.000	(2.540.000)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	39.930.837	117.122.300	(77.191.463)	(65,91)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 20120	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
360.369.183*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 360.369.183 dan Rp. 362.929.929. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97.094.154	94.040.291	3.053.863	3,24
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	251.320.641	266.785.526	(15.464.885)	(5,79)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	9.838.712	0	9.838.712	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	445.926	434.362	11.564	2,66
Beban Penyusutan Jaringan	1.669.750	1.669.750	0	
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	360.369.183	362.929.929	(2.560.746)	(0,70)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Surplus (defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. (230.659)*

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan Pelepasan	0	0	0	0,00
Aset Non Lancar				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	595.196	443.540	151.656	34,19
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	825.855	391.384	434.471	111,10
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(230.659)	52.156	(282.815)	(117,70)

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 36.147.619.080 dan Rp. 39.495.387.642.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. (5.189.197.846) dan Rp. (5.093.583.801). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.008.589.400 dan Rp. 3.034.200.322.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda

baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.010.202.062
Diterima dari Entitas Lain	(1.612.662)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	5.008.589.400

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp. (1.612.662) sedangkan DKEL sebesar Rp. 5.010.202.062.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk sebesar Rp. 0 dan Transfer Keluar Rp. 0. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sebesar 0. dari total 0 yang diterima sepanjang tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.967.010.634 dan Rp. 37.436.004.163.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Selama periode semester I TA. 2020 pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Bagian Anggaran 005.01 tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Kewajiban pembayaran pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0, sebagaimana daftar dalam lampiran.

F.2.3. Rekening Pemerintah

1. PT. BRI (Persero) Tbk A/C 024301000108309 a.n. BPG 043 PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA 402989 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 19.949.667. Untuk menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

F.2.4. Revisi DIPA

Selama tahun anggaran 2020, pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya bagian anggaran 005.01 terdapat revisi DIPA sebanyak satu kali tanggal 29 April 2020, revisi tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian rencana penarikan anggaran pada halaman tiga DIPA serta revisi dari eselon 1 BUA perihal penyesuaian pagu anggaran BA.BUN.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Selama tahun anggaran 2020, pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya bagian anggaran 005.01 tidak terdapat ralat SPM, SP2D, SSBP ataupun SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Pejabat pengelola keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Mukti Ali, S.Ag., MH.;
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Mauliannor, S.Ag.;
3. PPSPM : H. Abdul Ghoni Hamid, SHI., MHI.;
4. Bendahara Pengeluaran : Muhaimin;
5. Staf Pengelola Keuangan : - Cahyo Widodo, S.Kom;
- Ratna Kumalasari, S.P